

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan J. Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Administrator. 2015. "BPKP Puji Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo". Diakses pada 20 Juli 2017. <https://www.gorontaloprov.go.id/informasi/berita/prov-gorontalo/bpkp-puji-pengelolaan-keuangan-pemerintah-provinsi-gorontalo>
- Administrator. 2016. "Hasil Pemeriksaan BPK RI, Ungkap Kelemahan 4 Daerah". Diakses pada 20 Juli 2017. <http://radargorontalo.com/hasil-pemeriksaan-bpk-ri-ungkap-kelemahan-4-daerah/>
- Administrator. 2016. "Pemerintah Provinsi Apresiasi Kerjasama Dengan BPK". Diakses pada 20 Juli 2017. <https://gorontaloprov.go.id/informasi/berita/prov-gorontalo/pemerintah-provinsi-apresiasi-kerjasama-dengan-bpk>
- Administrator. 2017. "Bappeda Serius Terapkan e-Planning". Diakses pada 20 Juli 2017. <http://pareparekota.go.id/bappeda-serius-terapkan-e-planning/>
- Afriansyah, Rahmad D. dan Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 3, pp. 702-712.
- Asian Development Bank. 1995. *Governance: Sound Development Management*. Manila: Asian Development Bank.
- Attila, Gyorgy. 2012. "Agency Problems in Public Sector". Diakses pada 15 April 2017. <http://anale.steconomieuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015*. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015*. Gorontalo: BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten*

Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2015. Mamuju: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015*. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015*. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015*. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015*. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka 2016*. Banggai: BPS Kabupaten Banggai Laut.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2016*. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2016*. Tobadak: BPS Kabupaten Mamuju Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Morowali Dalam Angka 2016*. Bungku: BPS Kabupaten Morowali.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2016*. Kolonodale: BPS Kabupaten Morowali Utara.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*. Makassar: BPS Kota Makassar.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2016*. Parepare: BPS Kota Parepare.

Barbagallo, D. dan Comuzzi, M. *Towards Understanding the Role of Adverse Selection and Moral Hazard in Automated Negotiation of Service Level Agreements*. Disampaikan pada SIPE'08 Conference. Sorrento. 7 Juni 2008.

- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 2, pp. 110-125.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Effendi, Taufiq. 2007. *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Faria, Juliano Almeida dan Sonia Maria Gomes da Silva. 2013. The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management*. Vol. 7, No. 13, pp. 1086-1099.
- Fu, Renhui, A. Kraft, dan H. Zhang. 2012. "Financial Reporting Frequency, Information Asymmetry, and the Cost of Equity". Diakses pada 15 April 2017. https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Kraft/publication/228320663_Financial_Reporting_Frequency_Information_Asymmetry_and_the_Cost_of_Equity/links/00b495343e2d01d388000000.pdf.
- Gandia, J. L. dan M. C. Archidona. 2007. Determinants of Web Site Information by Spanish City Councils. *Online Information Review*. Vol. 32, No. 1, pp. 35-57.
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis*. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Hartono, D. Utomo, dan E. Mulyanto. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 6, No. 1, pp. 9-21.
- Hennink, M., I. Hutter, dan A. Bailey. 2010. *Qualitative Research Methods*. California: Sage Publications.
- Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. *3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Huwae, K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>.
- International Fund for Agricultural Development (IFAD). 1999. *Good Governance: An Overview*. Roma: IFAD.
- Jaya, J. D. dan E. A Sisdyani. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9.1, pp. 162-179.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jo, Hoje dan Yongtae Kim. 2007. Disclosure Frequency and Earnings Management. *Journal of Financial Economics*. Vol. 84, No. 2, pp. 1-45.

- Laswad, F., R. Fisher, dan P. Oyelere. 2001. Public Sector Financial Disclosure on The Internet: A Study of New Zealand Local Authorities. *Discussion Paper No. 92*. Canterbury: Lincoln University.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Artikel*. Th. I, No. 4, pp. 1-14.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
- Martani, D., D. Fitriasari, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60, No. 3, pp. 504-516.
- Medina, F., 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.
- Moon, M. Jae. 2012. The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*. Vol. 62, No. 4, pp. 424-433.
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.
- Nusantari, A. N. 2016. Analisis Determinan Tingkat Transparansi Keuangan dan Pengungkapan Kinerja Website Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus Pulau Jawa). *Skripsi*. Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Perez, M. C. C., M. P. R. Bolivar, dan A. M. L. Hernandez. 2014. The Determinants Of Government Financial Reports Online. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*. No. 42 E/2014, pp. 5-31.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No. 1, pp. 1-12.
- Puspita, Rora dan Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam

Website Pemda. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012.

Rahim, Wanda Mustika dan Dwi Martani. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. Disampaikan pada Konferensi Regional Akuntansi III (KRA III). Jember. 20-21 April 2016.

Redaksi Kareba Toraja. 2016. "HUT Toraja Utara Diwarnai Unjuk Rasa". Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://karebatoraja.com/hut-toraja-utara-diwarnai-unjuk-rasa/>.

Redaksi Turatea News. 2016. "Unjuk Rasa, Pembebasan Lahan Taman, Ka'bonga Telan Anggaran 4 Milyar". Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://turateanews.com/unjuk-rasa-pembebasan-lahan-taman-ka-bonga-telan-anggaran-4-milyar/>.

Redaksi Warta Pengawasan. 2009. "Yang Terpenting adalah Komitmen". Diakses pada tanggal 20 Juli 2017. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2317/Yang-Terpenting-adalah-Komitmen.html>

Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- Republik Indonesia. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. UU No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
- Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

Republik Indonesia. UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

Ridha, M. A. dan H. Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012.

Rudiyanto, Bartolomeus dan Heribertus Purwanugraha. 2015. "Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda". Diakses pada tanggal 25 Mei 2017. <http://e-journal.uajy.ac.id/8970/1/JURNAL.pdf>

Sari, D. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis 2012. Bandung. 27 Maret 2012.

Sari, D. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten)*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado. 25-28 September 2013.

Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No. 2, pp. 154-170.

Sofia, A dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website (Studi pada Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia). *Jurnal Media Indonesia*. Vol. 12, No. 4, pp. 297-308.

Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 19, No. 1, pp. 56-92.

Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. 2007. *What is Good Governance?*. Bangkok: UN ESCAP.

- Werimon, S., I. Ghozali, dan M. Nasir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli 2007.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Gorontalo”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Gorontalo.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Barat”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Barat.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Selatan.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tengah.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Tenggara.
- Wikipedia. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara”. Diakses pada 25 Februari 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Utara.
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Banggai Laut”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Laut
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Gorontalo”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gorontalo
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Mamuju Tengah”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju_Tengah

Wikipedia. 2017. “Kabupaten Morowali”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Morowali

Wikipedia. 2017. “Kabupaten Morowali Utara”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Morowali_Utara

Wikipedia. 2017. “Kota Makassar”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar

Wikipedia. 2017. “Kota Parepare”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare

World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington DC: World Bank Publication.

World Bank. 1994. *Governance: The World Bank's Experience*. Washington DC: World Bank Publication.